

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, tetap diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan Pemerintah, sebab tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Bank Indonesia dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya membutuhkan sumber daya manusia dan keuangan yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Keuangan harus dikelola dengan baik dan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dilakukan dengan menyusun laporan keuangan yang wajar. Di dalam Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan Bank Indonesia adalah aset dan liabilitas, Aset terdiri dari Aset Keuangan dan Aset Tetap.

Aset Tetap Bank Indonesia memiliki tanah, gedung, kendaraan dan berbagai peralatan teknologi informasi yang dikelompokkan sebagai aset tetap dan aset tidak berwujud. Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat aset tetap dan aset tidak berwujud sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia menggunakan model biaya untuk mengukur aset tetap dan aset tidak berwujud. Atas aset tetap dan aset tidak berwujud dilakukan penyusutan dan amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaatnya. Pengeluaran yang menambah masa manfaat aset diakui sebagai penambah biaya perolehan aset. Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset tetap dan aset tidak berwujud pada saat aset dimaksud telah habis masa manfaatnya, dijual, dihibahkan, ditukar, ditarik dari pemakaian atau hilang.

Aset diakui dalam laporan posisi keuangan apabila besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi pada masa depan diperoleh Bank Indonesia dan/atau perekonomian nasional serta aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Adapun, Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan apabila pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonomi dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam Bank Indonesia dan/atau perekonomian nasional setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif, transaksi semacam itu menimbulkan pengakuan beban dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia. Dengan perlakuan itu, tidak berarti pengeluaran yang dilakukan manajemen mempunyai maksud yang lain daripada menghasilkan manfaat ekonomi bagi Bank Indonesia pada masa depan atau bahwa manajemen salah arah. Konsekuensi satu-satunya adalah bahwa tingkat kepastian dari manfaat ekonomi yang diterima Bank Indonesia setelah periode akuntansi berjalan tidak mencukupi untuk membenarkan pengakuan aset.

Keandalan penyajian, pengungkapan dan penjelasan aset tetap bergantung pada Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia yang digunakan. BI berdasarkan (1) PDP2LK: Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, (2) PKAK 08: Aset Tetap, (3) PSAK 16: Aset Tetap.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas kebijakan akuntansi keuangan pada **Bank Indonesia** yang disajikan dalam penulisan laporan tugas akhir yang berjudul **“Penerapan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia Pada Akuntansi Aset Tetap”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dimuat penulis dalam laporan tugas akhir ini adalah Bagaimana Penerapan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia Pada Akuntansi Aset Tetap?

1.3 Tujuan Magang

Kegiatan magang yang dianjurkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa yang kompeten di bidangnya, tentu tidak hanya diperlukan teori saja tetapi juga praktik langsung di lapangan. sehingga Mahasiswa D3 – Akuntansi akan lebih siap ketika diminta terjun langsung ke lapangan. Adapun tujuan penyusunan laporan tugas akhir ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Kerangka Penyusunan KAKBI.
2. Untuk mengetahui dan sekaligus mempelajari Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) di Divisi Kebijakan Akuntansi.

3. Bagaimana penerapan kebijakan yang di pakai dalam pengelolaan Aset Tetap di Bank Indonesia.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

- a. Meningkatkan, memperluas dan memantapkan ilmu yang di dapatkan penulis selama perkuliahan sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja.
- b. Agar penulis mengetahui dan mengenal lapangan kerja yang sebenarnya.
- c. Melatih mental dan kepribadian penulis, inisiatif dalam menghadapi segala keadaan yang ada dalam masyarakat dan dunia kerja.

2. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

Sebagai referensi dan bahan acuan bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Pada Aset Tetap.

1.5 Lokasi dan Waktu Magang

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melaksanakan praktek kerja lapangan di Bank Indonesia yang berlokasi di Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta Pusat 10110 Indonesia. Sedangkan pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah selama 2 bulan yang dilaksanakan dari tanggal 2 Maret 2020 samapai dengan 24 April 2020. Hari kerja yang berlaku dari hari Senin sampai dengan Jumat dan waktu

pelaksanaan kegiatan praktek magang dimulai pukul 07.10 WIB sampai dengan 16.15 WIB.

1.6 Metode Penulisan

Di dalam pembuatan Laporan Tugas akhir ini penulis membutuhkan data-data yang berhubungan dengan kajian penulis, untuk memperoleh data yang relevan dan akurat sebagai dasar penyusunan laporan, penulis melakukan pengumpulan data-data dengan metode sebagai berikut:

1. Metode Pengamatan

Melakukan pengamatan secara langsung bagaimana KAKBI ini menjadi pedoman bagian kerja di Divisi Kebijakan Akuntansi di Bank Indonesia.

2. Metode Wawancara

Melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak terkait yang mempunyai atau mengetahui data dan informasi tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Keuangan pada Akuntansi Aset Tetap yang diperlukan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

3. Studi Pustaka

Dengan metode ini, penulis berusaha membaca serta mempelajari yang bersumber dari berbagai buku, data-data tertulis yang diperlukan oleh penulis yang berkaitan dengan materi laporan praktek kerja lapangan tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.